

**ANALISIS PROGRAM INOVASI DAERAH PADA PEMERINTAHAN
DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

OLEH

**SEPTIYA
NPM 1916041025**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

**ANALISIS PROGRAM INOVASI DAERAH PADA PEMERINTAHAN
DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**SEPTIYA
1916041025**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM INOVASI PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SEPTIYA

Inovasi merupakan salah satu faktor yang penting guna mendukung kegiatan perkembangan ekonomi serta daya saing daerah. Provinsi Lampung memiliki banyak inovasi daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Namun ternyata banyak inovasi daerah di Provinsi Lampung yang tidak diterima oleh Kementerian Dalam Negeri. Fenomena yang menjadi permasalahan adalah jenis atau bentuk inovasi daerah yang tidak dijelaskan serta banyaknya inovasi daerah yang dinilai bukan termasuk inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis inovasi daerah yang ada di Provinsi Lampung dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengusulan program inovasi daerah. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif meliputi analisis dokumen dengan pengumpulan data menggunakan perangkat QDA Miner dan wawancara. Tempat penelitian yang digunakan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi daerah di Provinsi Lampung jenis inovasi daerah di Provinsi Lampung didominasi oleh inovasi berbasis non digital dan sedikit yang berbasis digital. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengusulan program inovasi antara lain; perangkat daerah yang tidak memahami inovasi, data/bukti pendukung yang tidak lengkap serta sumberdaya yang selalu berganti dalam pengusulan program inovasi daerah.

Kata kunci: *Inovasi, Klasifikasi Inovasi, Program Inovasi Daerah*

ABSTRACT**ANALYSIS OF REGIONAL INNOVATION PROGRAMS IN REGIONAL GOVERNANCE IN THE LAMPUNG PROVINCE****By****SEPTIYA**

Innovation is an important factor to support economic development activities and regional competitiveness. Lampung Province has many regional innovations aimed at supporting the activities of the regional government of Lampung Province. However, it turns out that many regional innovations in Lampung Province were not accepted by the Ministry of Home Affairs. The phenomenon that is the problem is the type or form of regional innovation that is not explained and the number of regional innovations that are considered not to be innovation. This study aims to analyze the types of regional innovations that exist in Lampung Province and identify the obstacles encountered in proposing regional innovation programs. The method used is a qualitative approach including document analysis by collecting data using the QDA Miner tool and interviews. The place of research used is the Regional Research and Development Agency of Lampung Province. The results of the study show that regional innovation in Lampung Province is dominated by non-digital-based innovations and a few are digital-based. Some of the obstacles encountered in proposing innovation programs include; regional apparatus who do not understand innovation, incomplete supporting data/evidence and constantly changing resources in proposing regional innovation programs

Keywords: Innovation, Innovation Classification, Regional Innovation Program

Judul Skripsi : **ANALISIS PROGRAM INOVASI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Septiya**

No. Pokok Mahasiswa : **1916041025**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.

NIP 19810628 200501 1 003

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

NIP 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

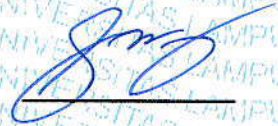
Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.



Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Septiya
NPM 1916041025

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02-Juni-2001. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Faisol Dahlan dan Ibu Sundari dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki seorang adik perempuan bernama Diana Pesesa.

Tahun 2007, Penulis mengawali pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Tanjung Aman diselesaikan pada tahun 2013, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Kotabumi diluluskan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotabumi dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada didalam maupun diluar kampus. Mulai dari kegiatan organisasi mahasiswa, pengabdian dan penelitian, serta kegiatan sosial lainnya. Dalam organisasi diluar kampus penulis pernah menjadi Human Resources di Aikite dan MC pelatihan kerja bersertifikat resmi yaitu Chahra Event. Pada tahun 2020 penulis juga mengikuti kegiatan Kampus Mengajar dan menjadi Narasumber Kemendikbud. Pada Tahun 2021 penulis juga mengikuti kegiatan MSIB yaitu Transformasi Digital In The Government. Pada Tahun 2022 penulis menjadi Sekretaris Bidang Sumber Daya Organisasi Himagara pada tahun 2022.

MOTTO

**“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk dirimu sendiri”**

(QS. Al-Isra:7)

**“Tetaplah berbuat baik, jangan pernah menyesal berbuat baik sama orang.
Semaksimal mungkin dan sebisa mungkin harus saling memaafkan”**

(Emil Mario)

**“Jangan terlalu memenuhi ekspektasi orang lain, karena sesungguhnya
kebahagiaan diri sendiri paling utama”**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, Aku persembahkan karya ini untuk :

KELUARGA BESAR AYAH DAN UMI KU TERCINTA

Bapak. Faisol Dahlan Dan Ibu. Sundari

Yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan

Terimakasih atas cinta, kerja keras dan kesabaran yang telah diberikan untuk

Keberhasilan dan kesuksesan pendidikanku

PARA PENDIDIK DAN CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Terimakasih atas memberikan bekal ilmu serta moral untuk melangkah lebih maju di masa depan

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung**". Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, bantuan, dorongan, kritik dan saran dari dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada:

1. Untuk Keluargaku tercinta, Ayah, Umi dan adikku, terimakasih telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anakmu. Terimakasih atas kasih sayang dan alasanmu untuk terus belajar dan perhatian yang selalu diberikan setiap harinya, serta untuk waktu, tenaga, biaya yang telah dikorbankan.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, saran dan bimbingannya.
3. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing pendamping penulis. Terimakasih atas ilmu, waktu dan saran, nasehat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Terlepas dari hal itu terimakasih atas segala kesempatannya telah diberikan banyak pengalaman dari ilmu yang ibu berikan.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Seluruh Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Terkhusus Mba Sinta, Ibu Febi, Kak Fitra dan Mba Okta terimakasih telah memberikan ilmu serta pengalaman selama proses magang dan telah membantu proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
8. Kepada saudara-saudaraku UNFAEDAH, terimakasih sudah menjadi tempat berteduh dan bersandar selayaknya rumah yang nyaman untuk selalu dijaga kehangatan di dalamnya.
9. Kepada sahabat Uget Uget Pasti Bisa, Veronika, Siti Darina, Junia, Widya, Katarina, terimakasih telah menjadi bagian dari masa perkuliahan, sukses untuk kita semua.
10. Kepada seluruh teman-teman GRANADA angkatan 2019, terima kasih untuk setiap momen suka dan duka selama perkuliahan yang telah dilalui bersama, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan satu sama lain sehingga kita semua tetap bertahan dan mampu pada tahap ini.
11. Kepada mba abang ANDALUSIA terkhusus Mba Zanu, Mba Vita, Mba Susan, Bang Chiesa, Bang Gandhi serta mba abang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan bimbingan selama perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada adik-adik ADAMANTIA dan GILGAMARA, terimakasih selalu bersedia menjadi tempat berbagi cerita kehidupan kampus, semangat dan terus saling menguatkan untuk menyelesaikan perkuliahannya.
13. Kepada Partner Asisten Laboratorium Jurusan, Anin dan Egi terimakasih untuk terus belajar, membantu, dan memberikan pengalaman yang sudah dilewati bersama.
14. Kepada teman-teman Demisioner Kabinet Arutala, Iqbal, Ndung, Anada, Alif, Rofiq, Faradipa, Jono, Vero, Reza, Anin, Laila, Aqila, Ayyas, Titi, Caca, Putri, Terimakasih untuk berbagai pengalaman bersama di HIMAGARA.
15. Kepada teman-teman kampus, Dinda, Oliv, Mute, Zahra, Aidila, Kezia, Amal, Rofiq, Jimmy, terkhusus Faradipa yang menemani dari awal kuliah, terimakasih atas bantuan dari pagi ke malam hingga pagi kembali.
16. Kepada ketiga orang baik seperti *call center* 112 untuk adik kecilnya, Abang Agung terimakasih sudah menepati janji ditemani dari awal hingga akhir,

Abang Dimas terimakasih sudah selalu menguatkan dan memberikan motivasi, Abang Hizbul yang tiada hari tanpa memarahi dan membantu penulis.

17. Kepada Anada Syofira, sehat selalu untuk kita yang selalu berusaha kuat didepan banyak orang, *let's go a day in my life* dan ditunggu gelar S.A.N nya. Terimakasih sudah mau menjadi tempat anak kecil ini merengek untuk sebuah makanan atau permasalahan.
18. Kepada M. Alif Listiansyah, terimakasih sudah menjadi kabid yang baik, terimakasih sudah menjadi teman yang baik mendengarkan semua omelan dan renekan dari seorang aya yang menyebalkan setiap harinya. Sehat selalu untuk anak yang kuat.
19. Kepada Senja Rantika dan Dandung Kasakean, Terimakasih sudah menjadi tempat untuk melatih kesabaran dan berbagi pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi PJ Maba 2019.
20. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| MENYETUJUI..... | v |
| MENGESAHKAN | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| SANWACANA | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| I. PENDAHULUAN | 18 |
| 1.1 Latar Belakang | 18 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 25 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 25 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 25 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 26 |
| 2.1 Inovasi | 26 |
| 2.1.1 Inovasi Sektor Publik..... | 28 |
| 2.1.2 Karakteristik Inovasi | 31 |
| 2.1.3 Prinsip Inovasi | 33 |
| 2.1.4 Jenis Inovasi..... | 36 |
| 2.1.5 Kriteria Inovasi | 39 |
| 2.2 Inovasi Dalam Konteks Administrasi Publik..... | 41 |
| 2.2.1 Pentingnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sektor Publik..... | 44 |
| 2.2.2 Klasifikasi Inovasi..... | 47 |
| 2.2.3 Manfaat Inovasi Sektor Publik..... | 49 |
| 2.3 Kerangka Pikir..... | 51 |

| | |
|---|------------|
| III. METODE PENELITIAN | 53 |
| 3.1 Tipe Penelitian..... | 53 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 54 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 55 |
| 3.4 Jenis Sumber Data | 55 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| 3.6 Teknik Keabsahan Data..... | 59 |
| 3.7 Uji Keabsahan Data..... | 60 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 61 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 61 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung..... | 61 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung..... | 63 |
| 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 67 |
| 4.2.2 Kategorisasi Inovasi Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung | 68 |
| 4.2.3 Hambatan-Hambatan Dalam Pengusulan Inovasi Daerah. | 110 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | 120 |
| 5.1 Kesimpulan | 120 |
| 5.1.1 Kategorisasi inovasi daerah di Provinsi Lampung | 120 |
| 5.1.2 Hambatan-hambatan dalam pengusulan inovasi daerah..... | 121 |
| 5.2 Saran..... | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |
| LAMPIRAN..... | 128 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020..... | 21 |
| Tabel 2. Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 3. Jumlah Inovasi Terkirim dan Tidak Terkirim IID 2021. | 23 |
| Tabel 4. Model Proses Inovasi yang berorientasi pada organisasi..... | 48 |
| Tabel 5. Model Proses Inovasi yang berorientasi pada individual..... | 49 |
| Tabel 6. Daftar Dokumentasi | 57 |
| Tabel 7. Daftar Informan Dalam Penelitian | 59 |
| Tabel 8. Daftar Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Lampung | 62 |
| Tabel 9. Daftar Inovasi Daerah di Provinsi Lampung tahun 2021 | 69 |
| Tabel 10. Hasil Pengkodean Menggunakan Software QDA Miner..... | 84 |
| Tabel 11.96 Inovasi Daerah Ditolak Tahun 2021 | 85 |
| Tabel 12.Inovasi Daerah Ditolak Berbasis Digital Maupun Non Digital . | 88 |
| Tabel 13. Inovasi Daerah Provinsi Lampung Diterima | 89 |
| Tabel 14. Inovasi Daerah Provinsi Lampung Diterima Berbasis Digital Maupun Non Digital | 91 |
| Tabel 15. Daftar Inovasi Daerah Berbasis Non Digital Provinsi Lampung Diterima..... | 93 |
| Tabel 16. Inovasi daerah yang diterima | 95 |
| Tabel 17. Kategori Inovasi Produk/Jasa..... | 97 |
| Tabel 18. Kategori Inovasi Proses | 103 |
| Tabel 19.Kategori Inovasi Strategi | 107 |
| Tabel 20.Hambatan pengusulan inovasi daerah..... | 111 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Kerangka Pikir..... | 52 |
| Gambar 2. Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah..... | 66 |
| Gambar 3. Diagram Hasil Pengkodean..... | 85 |
| Gambar 4. Diagram Hasil Pengkodean..... | 89 |
| Gambar 5. Hasil diagram Pengkodean..... | 92 |
| Gambar 6. Diagram hambatan pengusulan inovasi daerah..... | 112 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi merupakan salah satu faktor yang penting guna mendukung kegiatan perkembangan ekonomi serta daya saing daerah. Sebuah daerah yang menginginkan terciptanya kesejahteraan harus mampu berkembang secara terus-menerus. Tentunya hal tersebut dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing yang produktif. Peran serta pengembangan inovasi menjadi sangat penting serta krusial, dengan adanya inovasi yang berkelanjutan tentunya sangat diperlukan bagi pengembangan daerah guna memiliki keunggulan melalui produk/jasa dan komoditas yang berdaya saing. Melalui inovasi yang telah dikembangkan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Susanto dalam bukunya yaitu *Management Gems* (2010) inovasi memiliki definisi atau pengertian tidak hanya terkait membangun atau memperbaiki, akan tetapi juga dapat didefinisikan secara umum atau luas yaitu memanfaatkan ide-ide baru dalam menciptakan produk/kasa, proses, dan layanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386, 387 dan pasal 388 yang menjelaskan tentang perlu inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (kepala daerah, OPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat. Inovasi juga menjadi program prioritas melalui Nawacita Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi. Kemudian, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah pasal 19 yang menyebutkan inovasi daerah harus sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

Sebagai gambaran umum, praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/*award* dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan penilaian inovasi daerah yang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2022.

Indeks inovasi daerah merupakan suatu proses penilaian atau sistem pengukuran terhadap segala bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks. Berdasarkan Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Indeks inovasi daerah menjadi dasar bagi kementerian dalam negeri untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA). Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang

selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pasal 19 tersebut dalam rangka pelaksanaan indeks inovasi daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah pasal 25 tentang inovasi daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan daerah. Menanggapi dua Peraturan Pemerintah tersebut Provinsi Lampung sendiri telah melaksanakan sekaligus turut berpartisipasi pada indeks inovasi daerah sejak tahun 2017 dan mengirimkan inovasi-inovasi daerah yang telah terlampir atau sudah dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung.

Pada tahun 2017 Provinsi Lampung turut serta berpartisipasi dalam indeks inovasi daerah namun tidak menerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA), pada tahun 2018 dan 2019 Provinsi Lampung sendiri tidak ikut serta dalam pelaksanaan indeks inovasi daerah dikarenakannya kurang persiapan dari pemerintah daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun 2020, pemerintah daerah Provinsi Lampung kembali turut serta dalam pelaksanaan indeks inovasi daerah dan berhasil memperoleh peringkat 3 nasional dalam penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Berikut disajikan data tabel untuk melihat posisi Provinsi Lampung dalam indeks inovasi daerah pada tahun 2020:

Tabel 1. Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

| No. | Pemerintah Daerah | Skor | Kategori |
|-----|---------------------|--------|-----------------|
| 1 | Jawa tengah | 36.357 | Sangat Inovatif |
| 2 | Sumatera selatan | 24.062 | Sangat Inovatif |
| 3 | Lampung | 14.599 | Sangat Inovatif |
| 4 | DKI Jakarta | 10.532 | Sangat Inovatif |
| 5 | Banten | 8.191 | Sangat Inovatif |
| 6 | Sumatera Barat | 7.066 | Sangat Inovatif |
| 7 | Jawa Barat | 6.879 | Sangat Inovatif |
| 8 | Jambi | 5.244 | Sangat Inovatif |
| 9 | Jawa Timur | 5.043 | Sangat Inovatif |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | 3.831 | Sangat Inovatif |
| 11 | Bengkulu | 3.585 | Sangat Inovatif |
| 12 | Sulawesi Tengah | 3.243 | Sangat Inovatif |
| 13 | Kalimantan Utara | 3.110 | Sangat Inovatif |
| 14 | Kepulauan Riau | 3.080 | Sangat Inovatif |
| 15 | Riau | 3.078 | Sangat Inovatif |

Sumber: Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat jelas bahwa pada tahun 2020, Provinsi Lampung menjadi provinsi yang sangat inovatif dengan begitu dapat dipastikan banyak inovasi-inovasi daerah yang mendapat apresiasi dan menjadi terobosan baru untuk Provinsi Lampung sendiri. Pada tahun 2021 berbekal kepercayaan diri dan pengalaman di tahun 2020 yang telah mendapatkan peringkat 3 nasional Provinsi Lampung turut kembali berpartisipasi guna mempertahankan peringkat yang telah didapat. Akan tetapi, pada tahun 2021 ini Provinsi Lampung tidak mendapat penghargaan. Provinsi Lampung keluar dari 5 besar penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* dan menempati posisi peringkat yaitu 15 besar. Berikut disajikan data tabel untuk melihat posisi Provinsi Lampung dalam Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021:

Tabel 2. Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| No. | Pemerintah Daerah | Skor | Kategori |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|
| 1 | Sumatera Selatan | 79.51 | Sangat Inovatif |
| 2 | Nusa Tenggara Barat | 75.67 | Sangat Inovatif |
| 3 | Jawa Timur | 63.15 | Sangat Inovatif |
| 4 | Jawa Barat | 62.82 | Sangat Inovatif |
| 5 | Jawa Tengah | 62.57 | Sangat Inovatif |
| 6 | Sumatera Barat | 61.13 | Sangat Inovatif |
| 7 | Jambi | 61.03 | Sangat Inovatif |
| 8 | Banten | 60.52 | Sangat Inovatif |
| 9 | DKI Jakarta | 58.68 | Inovatif |
| 10 | Bengkulu | 57.93 | Inovatif |
| 11 | Kepulauan Bangka Belitung | 57.12 | Inovatif |
| 12 | Nusa Tenggara Timur | 53.38 | Inovatif |
| 13 | Kalimantan Barat | 52.74 | Inovatif |
| 14 | Gorontalo | 50.42 | Inovatif |
| 15 | Lampung | 50.18 | Inovatif |

Sumber: Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa posisi Provinsi Lampung turun jauh ke peringkat 15. Setelah melihat hasil dari data tersebut Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mengadakan kajian lebih lanjut mengenai jatuhnya peringkat Provinsi Lampung. Berdasarkan koordinasi bersama tim pusat (tim pelaksana dari Kementerian Dalam Negeri) untuk memperbaiki kesalahan dari Provinsi Lampung yang mengakibatkan banyak inovasi-inovasi daerah di Provinsi Lampung yang ditolak. Inovasi-inovasi tersebut ditolak karena tidak memenuhi kriteria atau indikator-indikator dari Indeks Inovasi Daerah yang telah tertuang pada petunjuk pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah.

Pada kedua data tersebut, setelah ditelaah lebih lanjut lagi pada tahun 2020 Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga dikarenakan banyaknya inovasi yang dikrim serta penilaian indikator-indikator indeks inovasi daerah yang masih pada penyesuaian atau masih banyak yang perlu dibenahi dan belum adanya sistem penilaian yang mengukur kualitas inovasi tersebut. Namun, pada tahun 2021 sistem penilaian indeks Inovasi daerah sudah mendekati penyempurnaan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya indikator rancang bangun sebelum masuk kepada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) hal ini guna menunjukkan kualitas, kebaruan dan termasuk inovasi

digital ataupun non digital pada inovasi yang akan diajukan nantinya. Setelah ditelaah lebih lanjut lagi, ternyata pada tahun 2021 banyak inovasi daerah dari Provinsi Lampung yang tidak sesuai pada indikator rancang bangun ini yang mengakibatkan skor penilaian rendah hingga ditolaknya inovasi tersebut.

Tabel 3. Jumlah Inovasi Terkirim dan Tidak Terkirim IID 2021.

| No. | Jumlah Inovasi Terkirim Dan Tidak Terkirim IID 2021 |
|-----|---|
| 1. | Inovasi Terkirim 133 |
| 2. | Inovasi Tidak Terkirim 19 |

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023

Dari hasil riset yang dilakukan, didapatkan hasil 133 inovasi terkirim dan 19 inovasi yang tidak terkirim. Namun setelah ditelaah lebih lanjut ditemukan bahwa dari 133 inovasi yang terkirim, jumlah inovasi yang diterima tidak mencapai setengah atau 50% dari inovasi yang diterima oleh Tim Penilai atau Kementerian Dalam Negeri. Hal itu menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut terkait inovasi-inovasi daerah yang ditolak atau tidak diterima oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan penghargaan *Innovative Government Award (IGA)*. Salah satu inovasi daerah yang terkirim pada tahun 2021 adalah Sistem informasi perencanaan penganggaran keuangan daerah (SIPPKD) yang merupakan pembuatan aplikasi guna meningkatkan efektivitas, implementasi dan akuntabilitas keuangan daerah, jika dilihat dari manfaatnya inovasi sangat bermanfaat terutama kepada perangkat daerah. Namun, diketahui bahwa ternyata pada tahun 2021 aplikasi SIPPKD ini tidak diterima atau ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentunya hal ini menjadi pertanyaan mengapa inovasi tersebut tidak diterima atau ditolak.

Inovasi yang dibuat oleh perangkat daerah banyak ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan standar penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID). Hal ini dapat dilihat dari point atau skor yang didapat oleh setiap inovasi yang diterima. Ada beberapa alasan atau indikator ditolak atau tidak diterimanya inovasi-inovai daerah tersebut dalam Indeks Inovasi Daerah yaitu inovasi tersebut bukan merupakan pembaruan atau tidak ada pembaruan dari inovasi tersebut, inovasi tersebut tidak menjelaskan *before* dan *after* pembuatan inovasi tersebut serta

manfaat dari inovasi itu sendiri baik kepada masyarakat, pemerintah maupun perangkat daerah itu sendiri, inovasi tersebut belum diujicobakan selama 1-2 tahun serta tidak melampirkan dokumentasi saat pelaksanaan inovasi tersebut yang menjadi bukti kongkret bahwa inovasi tersebut sudah dilaksanakan dan memberi manfaat serta membawa perubahan atau pembaruan.

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi. Pada era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing terutama bagi suatu daerah. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi. Inovasi Daerah merupakan suatu kebutuhan bagi setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia guna mendukung peningkatan pembangunan dari berbagai aspek. Hal itu dikarenakan inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah yang ada di Provinsi Lampung pun tidak terkait satu jenis inovasi saja namun ada beberapa jenis inovasi sesuai dengan klasifikasi inovasi daerah itu sendiri. Namun dilihat dari inovasi daerah yang tidak diterima atau ditolak dan diterima oleh Kementerian Dalam Negeri tidak diketahui jenis inovasi tersebut seperti apa dan jenis inovasi daerah apa yang banyak di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya program inovasi-inovasi daerah dari perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung dalam indeks inovasi daerah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menggali lebih dalam dan menganalisa pelaksanaan indeks inovasi daerah untuk mengetahui berbagai inovasi yang dilakukan Provinsi Lampung dan kategori dari inovasi itu sendiri serta hambatan yang ditemui oleh perangkat atau pemerintah daerah dalam pengusulan program inovasi daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersedia, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu

- a. Bagaimanakah kategorisasi Inovasi Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung?
- b. Apa sajakah hambatan dalam pengusulan program Inovasi Daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghasilkan kategorisasi inovasi daerah yang ada di Provinsi Lampung berdasarkan Indeks Inovasi Daerah.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui pemerintah daerah dalam pengusulan program inovasi daerah di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan serta informasi terutama bagi peneliti, serta masyarakat umum lainnya bila nantinya membaca hasil penelitian ini, yang tentunya berkaitan langsung dengan Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inovasi

Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 'kombinasi baru'. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Oleh karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (dalam de Jong & den Hartog, 2003) sedangkan istilah 'baru' dijelaskan Adair (1996) bukan berarti original tetapi lebih ke *newness* (kebaruan). Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat Schumpeter bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan nilai dari Produk/Jasa, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga *stakeholder* dan masyarakat (dalam de Jong & Den Hartog, 2003).

'Kebaruan' juga terkait dimensi ruang dan waktu. 'Kebaruan' terikat dengan dimensi ruang. Artinya, suatu produk atau jasa akan dipandang sebagai sesuatu yang baru di suatu tempat tetapi bukan barang baru lagi di tempat yang lain. Namun demikian, dimensi jarak ini telah dijabatani oleh kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat sehingga dimensi jarak dipersempit. Implikasinya, ketika suatu penemuan baru diperkenalkan kepada suatu masyarakat tertentu, maka dalam waktu yang singkat, masyarakat dunia akan mengetahuinya. Dengan demikian 'kebaruan' relatif lebih bersifat universal. 'Kebaruan' terikat dengan dimensi waktu. Artinya, kebaruan di jamannya. Jika ditengok sejarah peradaban bangsa Indonesia, maka pada zaman tersebut maka

bangunan Candi Borobudur, pembuatan keris oleh empu, pembuatan batik adalah suatu karya bersifat inovatif di zamannya.

Inovasi menurut Schumpeter dalam Sangkala (2013) memiliki arti, usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi sehingga, dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari produk/jasa, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan tidak hanya bagi lembaga pendidikan tapi juga *stakeholder* dan masyarakat. Wina Sanjaya (2008) dalam bukunya kurikulum dan pembelajaran, inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Secara harfiah inovasi / *innovation* berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, inovasi kadang diartikan sebagai penemuan namun, maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti *Discovery* atau *Invention*. *Discovery* mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, misalnya penggunaan model pembelajaran inkuiri dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut di Indonesia baru-baru ini dikembangkan, sebenarnya model pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di negara-negara lain, atau model pembelajaran melalui jaringan internet. Sedangkan *Invention*, memiliki pengertian penemuan yang benar-benar baru belum tercipta sebelumnya.

Menurut Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010) inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum inovasi berarti suatu ide, produk/jasa, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Inovasi adalah perubahan metode atau teknologi bersifat positif yang berguna dan berangkat dari cara-cara yang sudah ada sebelumnya dalam melakukan sesuatu. Untuk inovasi sendiri terdiri dari dua tipe yaitu inovasi proses dan inovasi produk/jasa. Proses inovasi adalah perubahan yang memengaruhi cara output dalam produksi, sedangkan inovasi produk/jasa sendiri memiliki definisi sebaliknya yaitu inovasi produk/jasa adalah perubahan dalam *output* aktual baik itu barang maupun jasa itu sendiri.

2.1.1 Inovasi Sektor Publik

Inovasi dalam manajemen sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan desain kebijakan baru dan standar operasi baru yang dihasilkan oleh organisasi yang ditujukan kepada masalah kebijakan publik. Jadi, sebuah Inovasi dalam administrasi publik adalah efektivitas, kreativitas, dan jawaban unik terhadap masalah baru atau jawaban baru terhadap masalah lama. Sebuah inovasi tidaklah harus merupakan solusi sempurna atau berupa penyelesaian akhir, tetapi suatu solusi terbuka yang dapat ditransformasi oleh mereka yang mengadopsi.

Bartos (2002) dalam Sangkala (2013) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu "suatu perubahan dalam kebijakan atau praktik manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi". Lebih lanjut bahwa inovasi sulit di dalam sebuah organisasi terutama di dalam sektor publik. Ulasan dari berbagai literatur mengenai inovasi, terdapat pemahaman yang dapat diadopsi yaitu definisi inovasi dari Mulgan dan Albury (2003), sebagaimana dikutip oleh IDeA (2005).

Inovasi yang berhasil menurut (Mulgan dan Albury, 2003) adalah pembentukan dan implementasi dari proses, produk, jasa, dan metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, atau kualitas keluaran dalam penyampaian layanan. Definisi tersebut bila dikaitkan dengan sejumlah definisi para ahli lain dapat disimpulkan bahwa inovasi mengindikasikan sebuah proses yang

memiliki ruang lingkup luas dan proses yang lama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Leadbeater dalam IDeA (2005) bahwa proses inovasi memakan waktu lama, serta bersifat interaktif dan sosial dimana akan melibatkan banyak orang yang memiliki bakat, keahlian dan sumber daya yang berada secara bersama-sama.

Menurut West (2000) dalam Skripsi Sri Wahyuni (2016), inovasi berasal dari kreatifitas ide-ide baru. Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut secara aktual dan praktik. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi adalah Pertama, tantangan dalam lingkungan organisasi. Kedua, tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam proses maupun akhir suatu layanan. Ketiga, memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi. Keempat, adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk memastikan kerja gabungan yang efektif. Kelima, adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen. Keenam, dukungan manajerial yang berupa keinginan personal untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru yang lebih baik. Ketujuh, adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi. Terakhir, partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi.

Menurut Harvard Business Essentials (2003) dalam Skripsi Sri Wahyuni (2016) terdapat enam sumber ide inovasi yaitu pengetahuan baru (*new knowledge*) misalnya perkembangan sains dan teknologi, saran dan ide (*tapping the ideas*), pengguna utama (*lead user*) yaitu *stakeholders* dan individu, yang memiliki kebutuhan untuk sesuai, desain yang memahami masyarakat (*emphatic design*) ide inovasi diperoleh melalui pengamatan terhadap penggunaan barang dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum ditemukan masyarakat, penemuan (*invention vactories*) ide inovasi diperoleh dengan melakukan penelitian formal dan pengembangan, *skunkworks*, ide inovasi diperoleh dengan mempekerjakan orang berbakat yang memiliki perbedaan pandangan dengan organisasi dalam pemecahan masalah.

Kemudian untuk melaksanakan inovasi yang baik dan terarah, menurut Drucker (1965) dalam Skripsi Sri Wahyuni (2016) membahas prinsip-prinsip inovasi menjadi meliputi petunjuk apa yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dilakukan dan tiga persyaratan dalam melakukan inovasi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berinovasi adalah Pertama, inovasi yang terarah adalah sistematis. Inovasi yang terarah mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang berbeda, kepentingan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Inovasi yang sistematis diawali dengan analisis peluang dan langkah-langkah dari sederhana ke kompleks. Kedua, inovasi meliputi hal yang konseptual maupun perseptual. Konseptual meliputi konsep perubahan terbaik bagi organisasi, perseptual meliputi hasil evaluasi pemerintah, analisis sumber daya internal, masyarakat, agar pelaku inovasi dapat mengetahui kepuasan, peluang, harapan, nilai, dan kebutuhan.

- a. Inovasi harus efektif, sederhana, dan terfokus.
- b. Inovasi yang efektif dimulai dari hal yang kecil.
- c. Memerlukan komitmen dari pimpinan.

Adapun hal-hal yang harus dihindari dari praktek inovasi menurut Peter Drucker (1986):

- a. Jangan melakukan banyak hal pada waktu yang bersamaan.
- b. Jangan berinovasi untuk masa depan.
- c. Berinovasilah untuk masa sekarang.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan inovasi :

- a. Inovasi adalah kerja, maka hal ini membutuhkan pengetahuan dan keahlian tinggi.
- b. Inovator harus membangun inovasi berdasarkan kekuatan sendiri.
- c. Inovasi adalah dampak dari perubahan ekonomi dan kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, definisi dari inovasi sektor publik itu sendiri adalah suatu gagasan atau perubahan yang berorientasi pada kebaruan serta diimplementasikan dalam merubah membenahi

dan meningkatkan kualitas masukan, proses, penyampaian, dan produk/jasa barang dan jasa di sektor publik sehingga memiliki dampak yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Karakteristik Inovasi

Dalam perspektif Djamrud (2015) dipaparkan bahwa inovasi adalah suatu penemuan berbeda dari yang pernah ada, inovasi harus memiliki karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi, karakteristik inovasi terdiri dari empat sebagai berikut:

- a. Memiliki kekhasan/khusus yaitu inovasi memiliki ciri berbeda dari yang lain, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sebuah ide, program, tatanan, sistem sehingga kemungkinan hasil yang diharapkan akan terwujud.
- b. Memiliki ciri atau sumber kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik agar tidak monoton sebagai suatu karya dan hasil pemikiran yang murni atau orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - a. Inovasi dilaksanakan melalui strategi yang terarah, yang berarti sebuah inovasi dilakukan menggunakan proses yang tidak terburu-buru, namun dipersiapkan dengan matang dan jelas serta terencana.
 - b. Inovasi yang digerakkan mempunyai target, program inovasi yang akan dilaksanakan harus memiliki tujuan yang akan diperoleh, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut, pendapat lain datang dari Abernathy & Clark (1985) menurut pendapatnya inovasi memiliki 4 macam karakteristik, yaitu (dikutip dalam Stamm, 2008):

- a. *Architectural Innovation*

Inovasi tersebut memiliki arti pembentukan dasar dari produk/jasa dan proses serta menetapkan teknis dan agenda

pemasaran yang akan menggabungkan pengembangan selanjutnya.

b. *Market Niche Innovation*

Inovasi tersebut memiliki untuk membuka peluang pasar yang baru melalui teknologi yang berdampak pada sistem produksi dan teknis, serta menjaga, dan memperkuat desain yang ditetapkan.

c. *Regular Innovation*

Inovasi tersebut melibatkan perubahan berdasarkan pada kemampuan teknis dan produksi yang diberlakukan pada masyarakat yang ada. Dampak dari perubahan ini untuk menjaga keterampilan dan sumber daya yang ada.

d. *Revolutionary Innovation*

Inovasi tersebut mengganggu dan membuat pendirian teknis dan kemampuan produksi.

Karakteristik lain datang dan dicetuskan oleh Rogers, menurut pendapatnya inovasi dapat diterima oleh masyarakat cepat atau lambat itu sangat bergantung terhadap karakteristik inovasi itu sendiri. Menurut Everret M. Rogers (2003) karakteristik inovasi yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Keunggulan relatif (*relative advantage*), yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi.
- b. Kompatibilitas (*compatibility*), yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

- c. Kerumitan (*complexity*), yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
- d. Kemampuan diujicobakan (*triability*), yaitu di mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya.
- e. Kemampuan untuk diamati (*observability*), yaitu mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.

Karakteristik inovasi seperti yang telah dipaparkan oleh beberapa pendapat para ahli, secara umum karakteristik inovasi itu sendiri yaitu inovasi memiliki suatu keunggulan atau memiliki manfaat, inovasi memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan, inovasi tidak menyulitkan atau berdampak buruk, inovasi dapat dicoba atau dapat dipergunakan, inovasi dapat dilihat bentuk atau hasil dari inovasi tersebut.

2.1.3 Prinsip Inovasi

Inovasi mempunyai tujuan tertentu yang dihasilkan dari analisis, sistem, dan kerja keras. Kesemuanya dapat didiskusikan dan disajikan sebagai praktek inovasi dan justru itulah yang perlu ditampilkan karena jelas meliputi sekurang-kurangnya sembilan puluh persen dari semua inovasi yang efektif serta pelaku luar biasa dalam bidang inovasi seperti dalam setiap bidang lain

hanya akan efektif bila didasarkan pada suatu disiplin dan penguasaan disiplin itu.

Terdapat prinsip-prinsip inovasi yang dimulai dari hal-hal kecil tersistematis dan efektif. Inovasi yang terarah dan sistematis akan menjadikan inovasi lebih tertata dengan baik dan tidak pula rancu dengan mempertimbangkan ide-ide inovasi, sistematis, dan terarah telah menjadikan Indonesia berubah ubah dalam waktu ke waktu sesuai kondisi dan perubahan yang ada. Lalu prinsip yang lain inovasi haruslah efektif, sederhana, dan terfokus. Dimana inovasi ini diterapkan dengan betul-betul, didalam proses membangun suatu hal dibutuhkan rancangan awal dan sasaran yang tepat sehingga muncul keefektifan dalam berinovasi. Setelah itu menentukan alat yang akan digunakan dan mendukung proses inovasi. Ada beberapa prinsip inovasi yaitu sebagai berikut :

Menurut pendapat Peter Druker (1996) dipaparkan bahwa inovasi harus memiliki prinsip, agar inovasi dapat berjalan dengan terarah dan sistematis , prinsip tersebut yaitu :

- a. Inovasi yang mempunyai tujuan dan sistematis, dimulai dengan menganalisis peluang yang dinamakan peluang inovatif.
- b. Inovasi bersifat konseptual dan *perseptual*. Oleh karena itu, keharusan inovasi yang kedua adalah pergi ke luar untuk melihat, bertanya, dan mendengarkan. Para inovator melihat angka, melihat orang, menyusun secara analisa inovasi apa yang harus dilakukan untuk memenuhi sebuah peluang, dan pergi ke luar untuk memperhatikan masyarakat, mempelajari harapan mereka, nilai mereka, dan kebutuhan mereka.
- c. Agar efektif sebuah inovasi harus sederhana dan harus difokuskan.
- d. Inovasi yang efektif dimulai dari kecil. Tidak muluk-muluk. Ia mencoba melakukan sesuatu yang khas.

Pendapat lain datang dari Kuratko dan Hodgetts (2007), menurut pendapat Kuratko dan Hodgetts menyatakan bahwa inovasi memiliki prinsip sebagai berikut, yaitu Pertama, *be action oriented*, inovator harus selalu aktif

menciptakan ide-ide baru, peluang, atau sumber inovasi. Kedua, membuat produk, proses, atau jasa yang sederhana dan mudah dipahami orang dengan cepat memahami bagaimana inovasi bekerja. Ketiga, memulai dari yang kecil, inovator harus memulai dari yang kecil, kemudian memiliki ide untuk membangun, mengembangkan, dan memungkinkan untuk bertumbuh pada perencanaan dan ekspansi yang tepat dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Keempat, tujuan yang tinggi, inovator harus memiliki tujuan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dan mencari kedudukan yang sesuai di pasar. Kelima, *try/test/revise*, inovator harus mengikuti aturan yaitu mencoba, menguji, dan merevisi. Ini sangat membantu pekerjaan apapun kelemahan dalam produk, proses, atau jasa. Keenam, belajar dari kesalahan, inovasi tidak dapat menjamin kesuksesan. Bahkan dari kegagalan dapat menciptakan inovasi.

Pendapat lain datang dari Saleh dan Wang (dalam Ellitan dan Anatan, 2009), menurutnya ada tiga kunci sukses untuk melakukan inovasi secara efektif yaitu pertama, *enterpenueral* strategi yaitu berani mengambil risiko, melakukan pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen. Kedua, struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya disiplin interfunksional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional. Ketiga, iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan sistem imbalan yang efektif.

Inovasi harus memiliki prinsip-prinsip inovasi agar inovasi dapat dilihat perbedaan dan alasan inovasi tersebut dibuat. Prinsip-prinsip inovasi secara umum adalah dimana inovasi itu sendiri memiliki tujuan, tujuan dari setiap inovasi dibuat tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu setiap inovasi yang dibuat pasti memiliki sistematis dan tujuan, inovasi harus menjawab permasalahan yang timbul atau ada sebelum inovasi tersebut dibuat, inovasi harus dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami sehingga tidak menyulitkan masyarakat ataupun Perangkat Daerah.

2.1.4 Jenis Inovasi

Proses inovasi adalah proses yang bersifat kompleks dan tidak bisa dianggap sederhana, meskipun dengan memberikan suatu unsur yang baru. Namun, hal tersebut memerlukan aspek-aspek lain dalam konteks organisasi pada sektor publik atau organisasi pemerintahan yang meliputi hadirnya proses politik, kebijakan, kualitas, dan sebagainya. Menurut Mulgan dan Albury (2003), suatu inovasi dapat dikatakan berhasil, jika inovasi tersebut adalah kreasi dan pelaksanaan dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru. Kemudian semua hal tersebut merupakan hasil pengembangan nyata demi mendapat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Inovasi tidak hanya dalam lingkup produk dan pelayanan saja. Inovasi produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan berpedoman pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang relevan dengan inovasi tersebut. Ada beberapa pendapat terkait jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik menurut yaitu sebagai berikut:

Menurut pendapat Muluk (2005) jenis inovasi pada organisasi sektor publik dibagi menjadi 5 yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi metode pelayanan, inovasi strategi atau kebijakan, dan inovasi sistem. Pertama, inovasi produk, yaitu inovasi yang berawal dari perubahan pada desain dan produk suatu layanan dengan memisahkan dengan produk layanan sebelumnya. Kedua, inovasi proses, yaitu inovasi yang ditandai dengan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan manajemen yang diperlukan organisasi. Ketiga, inovasi metode pelayanan, yaitu inovasi dengan hadirnya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan *stakeholders* atau cara baru dalam menyediakan atau memberikan layanan. Keempat, inovasi strategi atau kebijakan, yaitu inovasi yang melihat pada aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru serta menyangkut realitas yang ada, sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru. Terakhir, inovasi sistem, yaitu kebaruan dalam

konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dengan tujuan melahirkan perubahan pengelolaan organisasi.

Sejalan dengan pendapat diatas, pendapat lain datang dari Holvarsen, menurut pendapat Holvarsen (dalam Zulfa Nurdin, 2016) jenis inovasi dibagi menjadi 3 yaitu inovasi terus-menerus, inovasi terus-menerus secara dinamis, dan inovasi terputus. Inovasi terus-menerus adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Inovasi terus-menerus secara dinamis, inovasi terus-menerus yaitu melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan masyarakat dalam pemakaian produk. Inovasi terputus yaitu melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan *stakeholders* atau masyarakat mengubah secara signifikan pola perilaku mereka.

Menurut pendapat Holvarsen membagi tiga-tipe inovasi dalam sektor publik:

a. *Incremental innovation to radical innovation*

Hal ini ditandai oleh tingkat perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada.

b. *Top-down innovation to bottom-up innovation*

Hal ini ditandai oleh mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarki, bermakna dari para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah.

c. *Need led innovations and efficiency-led innovation*

Hal ini ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien.

Selain itu, United Nation Development Program (dalam Zulfa Nurdin, 2006) menyatakan jenis inovasi antara lain: Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaruan institusi yang sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. Pembaruan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan agar tidak membebani anggaran publik. Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau teknik manajemen baru didalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru. Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara pemberian layanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi terutama dalam hal *service delivery*, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan. Dan inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk pemerintahan baru (seperti pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam pemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan horizontal).

Meeus dan Edquist (2001) membagi dua inovasi proses yaitu inovasi kategori-kategori:

- a. Inovasi proses teknologi mengubah cara produk yang diproduksi dengan memperkenalkan perubahan teknologi (fisik peralatan, teknik, sistem).
- b. Inovasi organisasi adalah inovasi dalam stuktur organisasi strategi, dan proses administrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis inovasi dalam sektor publik. Hal ini menggambarkan bahwa inovasi memiliki tipe atau jenis yang bermacam-macam. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis inovasi dalam sektor publik yang terdiri dari inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi dalam metode pelayanan, inovasi dalam strategi atau kebijakan, inovasi sistem, inovasi teknologi, dan banyak jenis inovasi seperti yang telah

dipaparkan diatas. Hal ini menggambarkan bahwa inovasi memiliki tipe atau jenis yang bermacam-macam.

2.1.5 Kriteria Inovasi

Setiap inovasi pasti memiliki kriteria tersendiri, ada beberapa kriteria inovasi yang harus dimiliki dari setiap pembuatan inovasi itu sendiri. Secara umum ada dua kriteria inovasi yaitu, inovasi berdasarkan proses dan inovasi berdasarkan metode.

a. Inovasi berdasarkan proses

Penerapan inovasi yang dilakukan berdasarkan proses meliputi peningkatan kualitas kerja dari berbagai *stakeholder* yang dilakukan secara efisien dan efektif. Mekanisme kerja organisasi publik yang cenderung lambat, berbelit-belit, dan rumit dirubah ke arah mekanisme kerja yang cepat, tepat, dan produktif. Tujuan dari inovasi proses adalah masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan.

Menurut kajian dari Lembaga Administrasi Negara (2016), terdapat dua jenis inovasi proses kerja. Pertama, inovasi secara internal, yang menyangkut proses kerja yang dilakukan di antara pegawai dalam lingkup intern suatu organisasi. Kedua, inovasi secara eksternal yang dilakukan oleh unit kerja yang berhubungan secara langsung dengan pihak luar (masyarakat dan pemangku kepentingan) dalam rangka menjalankan proses kerja rutin atau memberikan pelayanan publik. Ruang lingkup dari inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini dilaksanakan pada level tata laksana rutin.
- b) Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif.

- c) Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang.
- d) Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM).

b. Inovasi berdasarkan metode.

Kriteria penentuan inovasi berdasarkan metode dilakukan sebagai berikut; Pertama, bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menysasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya. Kedua, inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan. Ketiga, mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.

Menurut Susanto dan Putra (2010), ada 4 kriteria inovasi yaitu inovasi Produk yang meliputi produk ataupun layanan baru, proses inovasi mencakup produksi ataupun metode *delivery*, inovasi dari *supply chain* dimana inovasi mentransformasikan sumber dari input produk ke masyarakat dan inovasi pemasaran dimana hasilnya terlihat dalam evolusi metode baru marketing, dengan perangkat, tambahan dalam design produk, kemasan, promosi dan harga, dan sebagainya.

Pendapat lain datang dari Halvorsen (2005) kriteria inovasi sektor publik menurutnya adalah sebagai berikut:

- a) *A new or improved service* (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki)
- b) *Process innovation* (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan kearah yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan.
- c) *Administrative innovation* (inovasi administratif), misalnya penggunaan *instrument* kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.
- d) *System innovation* (inovasi sistem), adalah suatu sistem baru atau suatu perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru dari sebuah kerjasama dan interaksi.
- e) *Conceptual innovation* (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam *outlook*, contohnya manajemen air terpadu atau *mobility leasing*.
- f) *Radical change of rational* (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah.

2.2 Inovasi Dalam Konteks Administrasi Publik

Inovasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, *innovation* yang berarti perubahan. Inovasi juga didefinisikan oleh Makmur dan Rohana Tahier (2015) sebagai “suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan *input*, proses, dan *output*, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia”. Terjemahan dari pengertian tersebut adalah sebagaimana dikemukakan Makmur dan Rohana Tahier (2015) adalah “inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Sedangkan

dalam arti proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru.

Orientasi administrasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan rakyat dan kekuasaan rakyat (Thoha, 2011). Sehingga Administrasi Publik lebih menekankan pada perkembangan program aksi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Perkembangan program aksi itu dapat diwujudkan dalam pembangunan yang bersifat Inovasi. Inovasi dalam Administrasi Publik adalah efektifitas, kreativitas, dan jawaban unik terhadap masalah baru, atau jawaban baru terhadap masalah lama. Sebuah inovasi tidaklah harus merupakan solusi yang sempurna atau berupa penyelesaian akhir, tetapi suatu solusi terbuka yang dapat di transformasi oleh mereka yang mengadopsi (Sangkala, 2013).

Pendokumentasian dan berbagi inovasi dalam administrasi publik merupakan alat yang sangat penting didalam mengembangkan pembangunan dan mempromosikan pemerintah yang sukses. Tidak semua praktek inovasi sukses dalam jangka panjang yang kemudian dapat disebar ke setiap pemerintahan baik di level negara maupun daerah. Kaitan antara konsep inovasi dalam administrasi publik sebagaimana dikemukakan Makmur dan Rohana Tahier (2015) adalah bahwa “konsep inovasi administrasi merupakan argumentasi dengan penalaran yang dalam dan didasari pemikiran rasional seseorang dimana orang lain belum sempat memikirkannya dalam rangka melaksanakan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya inovasi dalam administrasi adalah perubahan dalam situasi atau suasana proses kerja sama terutama yang menyangkut bidang pekerjaan yang harus diselesaikan, proses kerja yang tidak selalu monoton dan membosankan, ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, serta peningkatan mutu professional sumber daya manusia yang terlibat dalam proses kerja sama (Makmur dan Rohana Tahier (2015)).

Adapun jenis Inovasi Administrasi Negara tersebut sebagai berikut:

a. Inovasi proses (*Process innovation*)

Inovasi Proses merupakan inovasi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. Ruang lingkup dari inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur.

b. Inovasi metode (*Method innovation*)

Inovasi metode merupakan Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ruang lingkup dari inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru.

c. Inovasi produk (*Product innovation*)

Inovasi produk merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Ruang lingkup dari inovasi produk adalah produk tersebut dapat berupa fisik (barang) maupun *non*-fisik atau imaterial (jasa).

d. Inovasi konseptual (*Conceptual innovation*)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. Ruang lingkup dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan.

e. Inovasi teknologi (*Technology innovation*)

Inovasi teknologi merupakan inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang lingkup dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.

- f. Inovasi struktur organisasi (*Organizational structure innovation*)
 Inovasi struktur organisasi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. Ruang lingkup dari inovasi struktur organisasi adalah pembaruan struktur yang dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur.
- g. Inovasi hubungan (*Relationship innovation*)
 Inovasi hubungan merupakan inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*.
- h. Inovasi pengembangan sumber daya manusia (*Human resources development innovation*)
 Inovasi pengembangan sumber daya manusia merupakan Inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Ruang lingkup dari inovasi sumber daya manusia adalah pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, *mindset*, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan.

2.2.1 Pentingnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sektor Publik

Penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat yang dikenal otonomi daerah. Pelaksanaan inovasi didahului adanya kajian terlebih dahulu mengenai inovasi yang akan dilakukan. Inovasi dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan peralatan yang baru dalam

organisasi pemerintahan. Inovasi dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan ide-ide baru yang diciptakan dalam suatu proses pelayanan.

Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016) mengatakan bahwa inovasi dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai. Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui :

- a. Pengenalan teknologi baru
- b. Aplikasi baru dalam produk dan pelayanan
- c. Penyumbangan pasar baru
- d. Pengenalan bentuk baru organisasi.

Dengan kata lain, inovasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat. Inovasi diperlukan dalam penyelenggaraan suatu organisasi baik sektor swasta maupun organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan. Inovasi dalam organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan bagi instansi pemerintahan menyusul semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan. Inovasi merupakan langkah solutif dari organisasi sektor publik untuk mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat dan upaya untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah.

Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas, inovasi adalah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayananan sesuai perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga inovasi pelayanan publik adalah

terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yg memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual.

Menurut Makmur dan Thahier (2015), sangat penting untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, hal itu karena tujuan inovasi secara umum adalah sesuatu bentuk kebutuhan yang ingin diwujudkan melalui kegiatan mengkontruksi pemikiran dengan diimplementasikan dalam tindakan nyata atau pekerjaan nyata untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sedangkan tujuan inovasi secara spesifik adalah menciptakan suatu kondisi agar dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas terkait inovasi, maka dapat disimpulkan bahwa Inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan pembaruan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. Suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan dapat dikatakan sebagai inovasi jika memiliki unsur kebaruan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Inovasi administrasi negara dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan yang memiliki unsur kebaruan dan manfaat yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. Jika inovasi administrasi negara dapat disamakan dengan inovasi sektor publik, maka Albury (2003) pernah mengungkapkan inovasi dalam sektor publik adalah ide-ide baru yang bekerja. Untuk lebih tepat "inovasi yang sukses adalah penciptaan dan pelaksanaan proses baru, produk, jasa dan metode pengiriman yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam efisiensi hasil, efektivitas atau kualitas. Dalam bidang administrasi publik, Dwiyanto (2013) mengungkapkan bahwa inovasi bidang administrasi publik adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau

proses administrasi publik. Memiliki dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa inovasi administrasi negara adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik

2.2.2 Klasifikasi Inovasi

Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010), dalam bukunya "*Innovation Management, context, strategies, system and process*" Pearson, mengatakan bahwa inovasi proses sering melibatkan baik perubahan adaptif yang signifikan dalam model organisasi bisnis saat ini atau adopsi dari model bisnis baru. Dalam hal ini pergeseran proses didorong oleh inovasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri, seperti inovasi produk dan strategi, atau mungkin didorong oleh inovasi eksternal. Inovasi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, yaitu:

- a. Inovasi produk
- b. Inovasi proses
- c. Inovasi strategi

Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010), mengklasifikasikan proses inovasi terbagi atas tiga bagian, antara lain:

- a. Inovasi Administrasi (*administrative innovation*), berhubungan dengan struktur organisasi dan proses administrasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas dasar pekerjaan dari sebuah organisasi dan berhubungan secara langsung.
- b. Inovasi Teknologi (*technology innovation*), berhubungan dengan teknologi produk, jasa, dan proses produksi.
- c. Inovasi Proses/Operasional (*process innovation*), adalah elemen baru yang diperkenalkan pada sebuah produksi atau operasi jasa, input bahan baku, spesifikasi tugas, pekerjaan dan informasi, dan peralatan yang digunakan, untuk produksi sebuah produk atau membuat jasa pelayan.

Dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung serta perubahan apa saja yang terjadi dalam proses inovasi, maka hasilnya dikemukakan tahapan proses inovasi. Dibawah ini akan diuraikan berbagai macam model pentahapan dalam proses inovasi yang berorientasi pada individu maupun yang berorientasi pada organisasi yang dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 dibawah ini.

Tabel 4. Model Proses Inovasi yang berorientasi pada organisasi

| No. | Shepard (1967) | Hage & Arken (1960) | Milo (1971) |
|-----|------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Konseptualisasi | Penemuan Ide | Evaluasi |
| 2. | Tentatif Adopsi | Adopsi | Inisiasi |
| 3. | Penerima Sumber | Implementasi | Implementasi |
| 4. | Implementasi | | Rutinisasi |
| 5. | Instusionalisasi | | |

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Pada model proses inovasi dalam organisasi disebutkan bahwa proses inovasi terdiri dari dua tahap yaitu, tahap permulaan dan tahap implementasi. Berikut ini akan dijelaskan tahap inovasi tersebut.

1. Tahap Permulaan
 - a. Langkah pengetahuan dan kesadaran
 - b. Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi
 - c. Langkah pengambilan kesimpulan
2. Tahap Penerapan (Implementasi)
 - a. Langkah awal mencoba menerapkan sebagian inovasi
 - b. Langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi

Tabel 5. Model Proses Inovasi yang berorientasi pada individual

| No. | Lavidge & Steiner (1961) | Colley (1961) | Rogers (1962) | Robertson (1971) |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | Menyadari | Belum menyadari | Menyadari | Persepsi tentang masalah |
| 2. | Mengetahui | Memahami | Menaruh perhatian | Menyadari |
| 3. | Menyukai | Mempercayai | Menilai | Memahami |
| 4. | Memilih | Mengambil tindakan | Mencoba | Menyikapi |
| 5. | Mempercayai | | Menerima (adopsi) | Mengesahkan |
| 6. | Membeli | | | Mencoba |
| 7. | | | | Menerima (adaption) |
| 8. | | | | Disonasi |

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

2.2.3 Manfaat Inovasi Sektor Publik

Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengenalan teknologi baru, aplikasi baru dalam produk dan pelayanan, penyumbangan pasar baru, pengenalan bentuk baru organisasi. Buffa, Butler, Miller (dalam Zulfa Nurdin, 2016) menyatakan bahwa inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, inovasi komponen strategis dibanyak perusahaan untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi, dan dilatarbelakangi oleh ketergantungan badan teknologi yang berpengalaman tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal bentuk produk dan tata cara penyampaian produk. Strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi yang diterjemahkan dalam kerjasama komersial yang menguntungkan.

Inovasi dan analisa praktek yang sukses menunjukkan bahwa strategi utama didalam sektor pemerintahan yaitu:

- a. Memberikan layanan terintegrasi, yaitu pemerintah menawarkan peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan disertai kenyamanan.
- b. Pelibatan warga, yaitu pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna mensukseskan inovasi, dan memungkinkan warga untuk mengungkapkan kebutuhannya sekaligus memastikan inovasi sukses dan berkelanjutan.
- c. Menjalin kerjasama/kolaborasi, yaitu pemerintah melakukan kolaborasi dengan lembaga terkait, instansi publik, swasta, untuk kesamaan cara pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan layanan publik.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi (TI), yaitu pemerintah memberikan layanan administrasi publik berbasis komputer dan internet untuk mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah. (Sangkala, dalam Zulfa Nurdin, 2016)

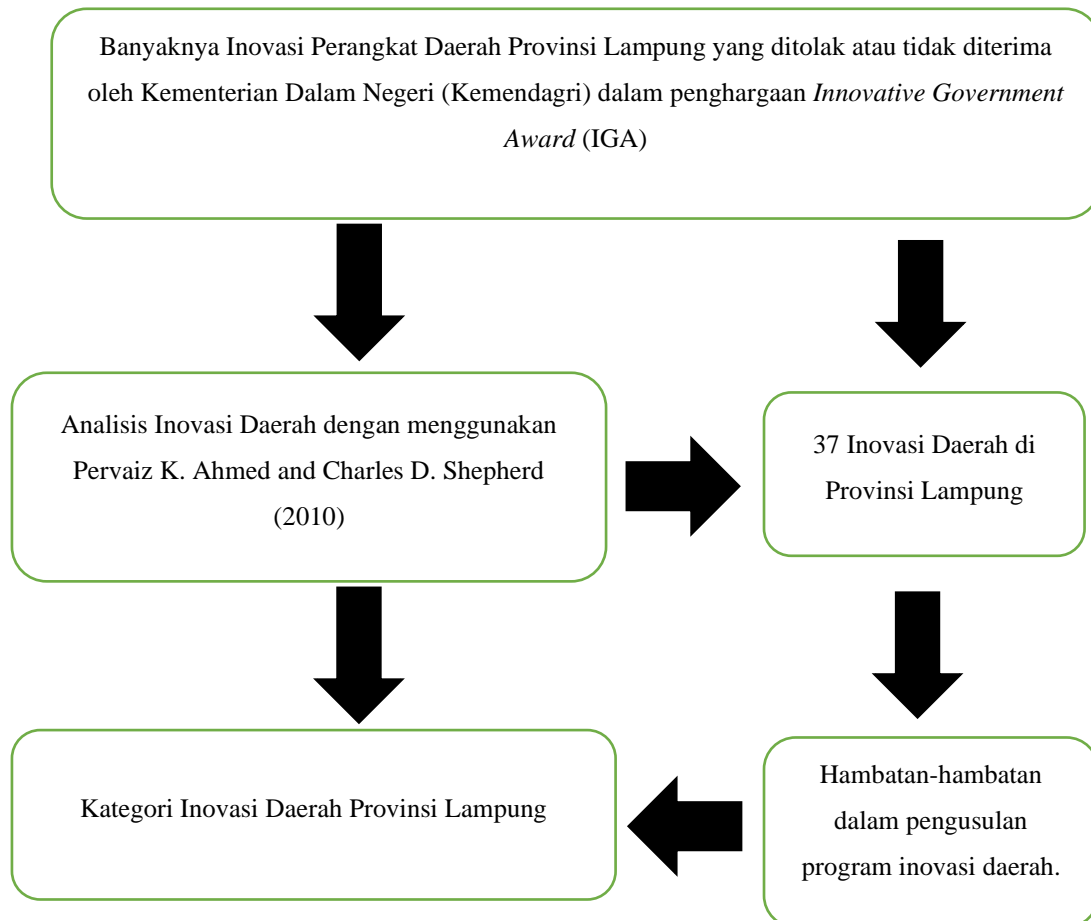
Hasil inovasi akan menciptakan peluang baru untuk berkarya lebih banyak. Salah satu manfaat berinovasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban dan memberikan kesempatan kepada semua pihak dalam berpartisipasi dan membuka peluang kepada banyak pihak untuk ikut menikmati hasil-hasil inovasi.

Menurut Makmur dan Thahier (2015), fungsi inovasi secara umum adalah sesuatu bentuk kebutuhan yang ingin diwujudkan melalui kegiatan mengkontruksi pemikiran dengan diimplementasikan dalam tindakan nyata atau pekerjaan nyata untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- b. Memungkinkan suatu perusahaan atau pemerintah untuk meningkatkan produk atau jasa yang dapat diperolehnya.
- c. Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.
- d. Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan acuan yang dibuat oleh peneliti dalam memberikan batasan pada proses penelitian agar fokus penelitian hanya pada satu masalah yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini kerangka pikir yang digunakan yaitu mengacu pada teori Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010) menjelaskan terdapat beberapa jenis inovasi di sektor publik antara lain: inovasi produk atau jasa, inovasi proses dan inovasi strategi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berharap dapat menghasilkan suatu penjelasan mendalam mengenai tulisan, ucapan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu masyarakat, kelompok, individu, organisasi tertentu yang dikaji dalam sudut pandang komprehensif, utuh, dan holistik. Guna mendapat hasil yang baik, peneliti harus mengumpulkan data dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya dengan teori yang ada agar mendapat hasil komprehensif berkaitan dengan Analisis Inovasi Daerah di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Inovasi Daerah yang ada di Provinsi Lampung Tahun 2022 serta untuk menghasilkan dan kategorisasi Inovasi Daerah yang ada di Provinsi Lampung.

Menurut pendapat yuliani penelitian deskriptif kualitatif dapat dijelaskan sebagai metode yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana dengan menggunakan alur induktif. Secara sederhana alur induktif dapat diartikan sebagai dalam sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif maka proses awal dimulai dengan sebuah proses atau fenomena tertentu sebagai penjas yang kemudian akan digenarilasasi dan ditarik sebuah kesimpulan dari proses atau fenomena tersebut. Sementara menurut tobing (2016) melalui bahan ajar metode penelitian kualitatif, tobing berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur dalam pengambilan data dimana data yang dihasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang tertulis dari suatu fenomena dan perilaku tertentu. Pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif akan dijabarkan secara alami

dan disajikan secara holistik dengan tujuan agar data yang dihasilkan tidak mengisolasi individu maupun organisasi kedalam sebuah variabel/hipotesis.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Penetapan fokus pada penelitian kualitatif ini memberi batasan pada ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan bertujuan untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus dan terarah pada isu yang akan diteliti. Fokus pada penelitian ini memberikan batasan dalam lingkup studi dan dalam pengumpulan data. Sehingga penelitian akan lebih terfokus kepada pokok masalah yang menjadi tujuan awal dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung.

Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah peneliti gambarkan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus mengenai hambatan serta kategorisasi Inovasi Daerah di Provinsi Lampung. Berdasarkan teori Pervais K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010), berikut ini merupakan penjelasan mengenai fokus pada penelitian ini, yaitu:

- a. Inovasi Produk, yaitu inovasi-inovasi daerah yang berawal dari perubahan pada desain dan produk suatu layanan atau jasa dalam milik Pemerintahan Daerah dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
- b. Inovasi Proses, yaitu inovasi-inovasi daerah yang merupakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dari program atau kebijakan serta perpaduan antara perubahan dan program yang sudah ada dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
- c. Inovasi Strategi, yaitu inovasi-inovasi daerah yang merupakan terobosan atau gagasan baru guna memecahkan permasalahan yang ada dalam Pemerintahan Daerah dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

Serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintahan daerah Provinsi Lampung saat pengusulan inovasi-inovasi daerah yang ada di Provinsi Lampung sehingga menyebabkan banyaknya inovasi yang ditolak atau tidak diterima.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Bandar Lampung dengan tempat yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung merupakan pihak yang menyelenggarakan pendampingan terhadap Indeks Inovasi Daerah dan tempat proses Indeks Inovasi Daerah berlangsung. Sehingga Bandar Lampung khususnya Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dipilih menjadi lokasi pada penelitian ini.

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian menjadi komponen yang begitu penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Berdasarkan dari sumbernya, data dapat dibagi kedalam bentuk data primer dan sekunder. Secara lebih jelas mengenai sumber data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer ini harus dilakukan pengolahan. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapatkan peneliti dari lapangan secara langsung baik dengan cara wawancara maupun hasil observasi dengan informan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap data primer yang biasanya data diperoleh dari sebuah bacaan atau tulisan yang berasal dari sumber tertentu seperti buku, dokumen, foto, dsb. Sumber data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap apabila tidak ditemukan data dari narasumber ataupun informan utama sebagai sumber data primer (Nugrahani, 2014). Pada dasarnya data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui catatan maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan Indeks Inovasi Daerah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Yaitu berupa pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan bukan berupa angka. Dalam proses pengumpulan sebuah data dapat dilakukan melalui berbagai sumber dan cara dalam mengumpulkan setiap data yang diperlukan. Selanjutnya jika ditinjau dari segi cara dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan.

Data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karya ilmiah, semakin banyak data yang diperoleh secara objektif, maka akan sangat membantu proses penelitian dan menentukan kualitas hasil penelitian. Data salah satunya dapat diperoleh melalui dokumen. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi serta wawancara.

a. Studi Pustaka

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sumber datanya diperoleh dari hasil yang diolah dari berbagai dokumen guna

mendukung data dalam penelitian. Secara harfiah dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang yang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Hardani et al,2020). Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari arsip Teknik Analisis Data. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi adalah arsip-arsip dokumen yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Dokumentasi yang akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini adalah:

Tabel 6. Daftar Dokumentasi

| No. | Nama Dokumen |
|-----|---|
| 1 | SK Kemendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 |
| 2 | SK Kemendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 |
| 4 | Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset Dan Inovasi Daerah |
| 5 | Surat Nomor 002.6/3857/SJ Tentang Pengukuran Dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022 |
| 6 | Inovasi Terkirim Dan Tidak Terkirim Indeks Inovasi Daerah 2021 |
| 7 | Daftar Inovasi Daerah Ditolak Tahun 2021 |

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2023

b. Studi Lapangan

Adapun studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid dan faktual yang diharapkan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan mencakup wawancara yakni:

a.) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Untuk memperoleh informasi secara akurat dari narasumber langsung, peneliti melakukan metode wawancara. Pada proses wawancara ini pertanyaan yang diberikan tidak berstruktur dan dalam suasana bebas yang santai maksudnya adalah menghilangkan kesan formal dengan menyesuaikan keadaan narasumber. Tujuan mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai seseorang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara berupa kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan subjek dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Penetapan yang sifatnya tidak kaku diharapkan dapat membantu penggalian lebih dalam mengenai informasi yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini juga bersifat terbuka sehingga subjek mengetahui bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Tabel 7. Daftar Informan Dalam Penelitian

| No. | Informan | Data yang dicari |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Bidang Kajian Strategis dan Penguatan Inovasi Daerah | Mengenai <i>follow up</i> proses, koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah |
| 2. | Kasubid Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah | Menjadi <i>key informant</i> , perencana dan pelaksana Indeks Inovasi Daerah |
| 3. | Kasubid Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana | Mengenai evaluasi daftar inovasi-inovasi daerah yang dikirimkan oleh Perangkat Daerah sebelum di input ke dalam sistem <i>Innovative Government Award</i> (IGA) |
| 4. | Staff Bagian Penguatan Inovasi Daerah | Data mengenai jumlah OPD yang mengirimkan inovasi, jumlah inovasi yang diterima dan ditolak |

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2023

3.6 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain. Denzin (1978) menyebutkan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu teknik yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori mendasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa kepercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang diperoleh dalam penelitian harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih. Sedangkan menurut Patton (1987) teknik triangulasi teori merupakan kegiatan penjelasan banding (*rival explanation*). Artinya apabila peneliti telah menguraikan pola, hubungan, dan memberikan penjelasan yang muncul dari suatu analisis, maka perlu mencari penjelasan pembandingan, baik secara induktif maupun logika. Dengan melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan penjelasan ini akan meningkatkan derajat kepercayaan (*trustworthiness*).

3.7 Uji Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode atau teknik untuk membuat kesimpulan atau hasil penelitian dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis. Secara sederhana merupakan kegiatan penelitian dengan cara data-data yang sudah diperoleh, dibaca, dipelajari, kemudian dianalisis secara mendalam. Kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Analisis data harus berpijak pada pendekatan berpikir yang jelas, hal ini bertujuan menjaga konsistensi setiap pembahasan yang dikembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan peneliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan analisis program inovasi daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Kategorisasi inovasi daerah di Provinsi Lampung

Pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 72,2% (96 inovasi daerah yang ditolak) pada 96 inovasi daerah yang ditolak ditemukan 57,9% (7 inovasi berbasis non digital) serta 14,3% (inovasi berbasis digital) dan 27,8% (37 inovasi daerah yang telah diterima atau dinyatakan sebagai inovasi daerah dari Provinsi Lampung). Pada 37 inovasi daerah ditemukan 18,8% (25 inovasi daerah berbasis non digital) dan 9,0% (12 inovasi daerah berbasis digital) dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa pada Provinsi Lampung sendiri yaitu pada tahun 2021 banyak mengajukan inovasi berbasis non digital dibandingkan inovasi berbasis digital sendiri.

Kemudian dari 37 inovasi daerah tersebut diperoleh hasil sebanyak non digital berjumlah 56,8% (21 inovasi daerah) dan inovasi digital berjumlah 43,2% (16 inovasi daerah). Selanjutnya ditemukan bahwa kategori inovasi produk/jasa adalah inovasi yang paling banyak diterima baik digital maupun non digital dengan jumlah 43,2% (16 inovasi daerah). Sedangkan pada kategori inovasi proses berjumlah 24,3% (9 inovasi daerah) dan terakhir yaitu inovasi strategi jumlah inovasi yaitu 32,4% (12 inovasi daerah). Pada tahun 2021 inovasi daerah Provinsi Lampung yang paling banyak ditemui adalah inovasi daerah kategori produk/jasa. Sedangkan setelah ditelaah

lebih lanjut lagi dari 96 inovasi ditolak atau tidak diterima, yang dikirimkan ternyata bukan berbentuk inovasi, akan tetapi hanya kegiatan rutin, program pusat, rapat dll.

Berdasarkan hal tersebut, baik inovasi daerah yang ditolak maupun diterima, ditemukan bahwa inovasi daerah non digital adalah inovasi yang banyak dilampirkan dengan jumlah 76,8% (inovasi daerah diterima dan ditolak non digital) sedangkan inovasi daerah digital 23,2% (inovasi daerah diterima dan ditolak digital) hal tersebut menunjukkan bahwa, inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Lampung didominasi oleh inovasi non digital.

Hal tersebut juga membuktikan bahwa inovasi tidak hanya berbentuk digital seperti pembuatan aplikasi atau *website* namun bisa saja berbentuk rekayasa sosial atau hal-hal baru dan kegiatan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Inovasi daerah dapat dibuat dengan menyesuaikan permasalahan yang ada pada suatu daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta daerah tersebut.

5.1.2 Hambatan-hambatan dalam pengusulan inovasi daerah

Pada Penelitian ini peneliti mendapati beberapa hambatan dalam proses pengusulan inovasi daerah pada pemerintah daerah di provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang tidak paham inovasi, hal ini merupakan suatu kendala atau hambatan yang cukup besar dalam pengusulan inovasi daerah. Inovasi-inovasi daerah yang dikirimkan bukan merupakan inovasi serta tidak memiliki kebermanfaatannya untuk masyarakat. Selain itu hambatan lainnya adalah perangkat daerah juga beranggapan bahwa yang termasuk inovasi adalah hal-hal

berbentuk suatu teknologi seperti pembuatan aplikasi atau *website*.

2. Bukti dukung yang kurang juga merupakan salah satu hambatan dalam proses pengusulan inovasi daerah. Hal itu diperuntukan untuk membuktikan bahwa kegiatan itu telah berlangsung, memberikan manfaat, menjadi solusi dari permasalahan yang timbul baik pada perangkat daerah, pemerintah maupun masyarakat serta bukti bahwa kegiatan tersebut benar adanya merupakan sebuah inovasi.
3. Sumberdaya manusia (SDM) perangkat daerah yang mengikuti pelatihan indeks inovasi daerah tidak konsisten yang mengakibatkan proses pendampingan serta pelatihan menjadi terhambat. Dalam proses pengusulan inovasi daerah terdapat sosialisasi atau pelatihan indeks inovasi daerah yang harus dihadiri oleh petugas atau perwakilan dari setiap perangkat daerah. Hal itu menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada perangkat daerah agar nantinya tidak ada kendala dalam proses pengusulan tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam analisis inovasi daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat melakukan pendataan 1 tahun sebelumnya mengenai inovasi yang akan diinput, sehingga ketika akan diinput inovasi tersebut sudah lebih siap baik dari segi *eviden base* atau lainnya. Serta inovasi yang diajukan adalah inovasi yang mengandung kebermanfaatan untuk masyarakat atau OPD dan inovasi tersebut berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur yang memuat nama-nama operator atau petugas perangkat daerah sehingga selama proses pelaksanaan indeks inovasi daerah tidak berganti atau berubah-ubah.
3. Inovasi-inovasi yang akan diajukan ditahun berikutnya sebaiknya dibuatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait inovasi yang akan difokuskan pada tahun berikutnya, sehingga pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui perangkat daerah akan fokus dalam mengembangkan inovasi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, J. (1996). *Effective Innovation. How to Stay Ahead of the Competition*. London: Pan Books
- Ahmed, Pervaiz K, & Shepherd, Charles D. (2010). *Innovation Management. New*. Jersey: Pearson Education, Inc
- Albury, David. (2003). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta : PT Elex Media.
- Anatan, Lina dan Lena Ellitan. (2009). *Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Atthahara, H. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1)
- Bateman, Thomas S, dan Snell, Scott A. 2014, *Management, Alih Bahasa: Ratno Purnomo dan Willy Abdillah McGraw-Hill Education* Jakarta: Salemba Empat.
- Crawford, M. & Benedetto, A.D. (2008). *New product management (9th ed.)*. New York: Mcgraw-hill
- Daryanto & Suryatri Darmiatun. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Gava Media : Yogyakarta.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: McGraw-Hill
- Dhewanto W, Dkk. (2014). *Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. CV Andi Offse : Yogyakarta
- Drucker, Peter. 1986. *Innovation and Entrepreneurship*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Halvorsen, Thomas, et al. (2005). *On the Differences between public and private sector innovations*. Publin Report.

- Hardani, Auliya, Dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- Hesselbein, Francis & Rob Johnston., (2002). *On Creativity, Innovation and Renewal*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung. PT Refika Aditama.
- IDeA, (2005) *Innovation in Public Service: Literatur Review*. IDeA Knowledge, September, Available online: <http://www.idea-knowlwdge.gov.uk/idk/aio/1118552>.
- Jong, De & Den Hartog., (2003). "Leadership as a determinant of innovative behavior". A Conceptual framework
- Kuratko, Donald F. & Hodgetts, Richard M. (2007). *Entrepreneurship: Theory, Process, Practise*. 7th ed. (South - Western/Thomson Publisher)
- Makmur dan Thahier, Rohana. 2015. *Inovasi dan Kreativitas Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Meeus, M. T., & Edgust, W. (2001). *Firm clustering and innovation: Determinants and effects*. *Papers in regional science*, 80(3)
- Moore, Christopher A., and Schilling, Brian K. (2005). *Theory and Application of Augmented Eccentric Loading*. *National Strength and Conditioning Journal*. 27(5), 20-27
- Mukhtar. (2007). *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah; Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Gaung Persada Press: Ciputat.
- Mulgan and Albury. (2003). UK. *Cabinet Office Discussion Paper : Innovation in the Public Sector, prime Minister's Strategy Unit*, cabinet 90 Office:UK, ver 1.9, October 2003 <http://www.strategy.gov.uk/workareas/innovation/index.asp>.
- Muluk, Khairul. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Najib, M., dan Kiminami, A., (2011). *Innovation, Cooperation and Business Performance: Some Evidence fom Indonesia Small Food Processing Cluster*. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*. 1 (1).

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patton, Michael Quinn. (1987) *Qualitative Education Methods, Beverly Hills: Sage Publication*
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Grasindo.
- Sa'ud, Udin S. (2010). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Samsudin, Sadili. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya : Capiya Publishing.
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana
- Sri Wahyuni, A. (2016). *Inovasi Dalam Pelayanan Publik Sektor Jasa Pt Pln Kabupaten Kepulauan Selayar*: Universitas Hasanudin Makasar
- Stamm, B.V. (2008). *Managing Innovation, Design and creativity (2nd ed)*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Jakarta: Alfabeta.
- Susanto, A.B., R. Masri Sareb Putra. (2010). *60 management gems*. Jakarta: Gramedia.
- Susanto. (2010) *60 Management Gems*. Jakarta, Kompas.
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi Di sektor Publik*. STIA-LAN Press : Jakarta
- Tahir, Muchlas dan Ahmad Harakan. (2015). *Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar*. Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom.
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). *Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18.

- Thoha, Miftah. (2011). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Tobing, D. hizki, Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. In Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.
- United Nations. (2005). *Innovations in the Public Sector: Compendium of Best Practices*. UNDESA. New York.
- Wahyuni, Sri. (2016). *Inovasi Dalam Pelayanan Publik Sektor Jasa PT. PLN Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi Sarjana Administrasi Negara Universitas Hasanudin.
- Yuliani, W. (2019). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. *Quanta*, 3(1), 9–19.
- Zulfa Nurdin. (2016). *Inovasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Universitas Hasanudin Makasar

Peraturan Pemerintah:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor. 14 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Insentif Inovasi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah